

**GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI),  
STUDI KASUS KELOMPOK SOLIDARITAS TAMBANG RAKYAT DI  
KECAMATAN TALIWANG, KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**DISUSUN OLEH :**

**HENY LISTIYA FEBRIANTI    145120101111067**

**JURUSAN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2020**

## **BAB I**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki ialah pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. (Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>, akses 17 Juni 2020).

Pengelolaan pertambangan saat ini tidak terlepas dari sejarah pengelolaan pertambangan di masa lalu, yang dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda dikenal dengan adanya “konsesi” sebagai bentuk perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan. Dasar hukum pengelolaan pertambangan saat itu adalah Indische Mijnwet 1899, yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda, sehingga tampak kebijakan yang dibentuk saat itu memihak pada pemerintah Hindia Belanda dan menomorduakan penduduk asli bangsa Indonesia. Pemberian kesempatan pengelolaan pertambangan diutamakan untuk pelaku usaha yang bangsa Belanda, baru kemudian bangsa Timur Asing dan terakhir barulah bangsa pribumi. Hal ini tentunya memberi dampak yang merugikan bagi bangsa Indonesia selama bertahun-tahun. Sistem konsesi pertama yang dianut dalam Indische Mijn Wet 1899 pada masa pemerintah Hindia-Belanda, melandasi bentuk pengelolaan pertambangan saat ini. (Hayati, )

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa, selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja, bagi Kota dan Kabupaten merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari Dinas dan Instansi terkait.

Pertambangan menjadi kegiatan yang bernilai sekaligus meresahkan. Pertambangan begitu menjanjikan karena dengan mengambil emas dari alam, masyarakat penambang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menjual hasil tambang dengan nilai tinggi. Sementara itu, ancaman terjadinya degradasi lingkungan juga ada karena pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui. Pertambangan juga bisa menjadi momok bagi masyarakat non penambang, karena dampak dari kegiatan pertambangan adalah pencemaran lingkungan. Salah satu jenis kegiatan pertambangan yang menimbulkan dampak negatif adalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

PETI adalah usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan / ketentuan hukum pertambangan resmi pemerintah pusat atau daerah. PETI dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang dan yayasan badan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong and backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Disisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI.

Penambang emas tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan perseorangan, sekelompok masyarakat, atau yayasan perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan sesuai instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awalnya, pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan atau sampingan di daerah-daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian intan, emas dan timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. (Herman, hlm 3)

Lebih lanjut, menurut Herman, hlm 3, terdapat beberapa faktor kemungkinan yang mempengaruhi aktivitas PETI ialah :*Pertama*, Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha. *Kedua*, Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi. *Ketiga*, Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama. *Keempat*, kemudahan pemasaran produk bahan galian. *Kelima*, Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum/pertambangan. *Terakhir*, Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit, dan memerlukan waktu panjang sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

Salah satu wilayah yang besar dengan sumber daya pertambangan ialah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Aktivitas PETI di Sumbawa Barat sudah ada sejak

tahun 2010, sejak warga pendatang Luasnya pertambangan di Sumbawa Barat mengakibatkan munculnya penambang emas tanpa izin (PETI). Peti di Sumbawa Barat sudah sangat meresahkan. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas PETI ialah pencemaran lingkungan karena para menggunakan mercury dalam aktivitasnya. Prof. Jennifer Goldstein, Dosen Cornell University telah meneliti dan mengunjungi sejumlah titik tempat aktifitas penambangan emas tanpa izin di wilayah setempat, dan menyatakan tingkat pencemaran sudah sangat mengkhawatirkan. (Enk, <https://arkifm.com/6530-pencemaran-mercury-di-sumbawa-barat-disorot-peneliti-internasional.html>, akses 21 Januari 2020

Pada sisi lain, dampak lainnya dari aktivitas PETI ialah adanya pelarangan dari pemerintah yang akhirnya menimbulkan reaksi perlawanan dari masyarakat PETI. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan untuk tetap melanjutkan rencana penertiban lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI). Meskipun sudah banyak lubang yang sudah ditutup paksa, tetapi faktanya upaya tersebut belum menjadikan aktivitas itu mati total. Karena masih banyak lokasi lain yang tetap melakukan aktivitas ilegal itu tanpa menggubris sosialisasi dan upaya tegas lainnya.

Dalam hal ini terjadi dualisme antara pemerintah dengan rakyat, dimana pemerintah ingin menutup pertambangan, sedangkan rakyat tidak mendapatkan solusi dari kebijakan tersebut. Sebagaimana Hayati, 2015 mengatakan lazimnya pada setiap kegiatan pertambangan (mineral dan batubara), selalu terdapat dua kutub hubungan hukum (*tweezijdige rechtsverhouding*), yakni antara pemerintah (*Goverment*) dengan pengguna tambang (*mining user*) atas dasar pengukuhan konsesi (*concessive*).

Selain terjadinya dualisme antara pemerintah dan rakyat penambang, isu kesehatan dan kerusakan lingkungan pun ada akibat aktivitas PETI. Hasil riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian kesehatan bahwa paparan merkuri dari sejumlah sampel tanaman dan air kadar merkurnya sudah berada diatas ambang batas. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi

kesehatan dan lingkungan sehingga tidak ada lagi alasan bahwa PETI ini untuk tidak dertibkan. Jika masalah ini tetap dibiarkan tetap berlarut maka dampak kerusakannya akan semakin parah

Sementara itu, dari pihak masyarakat penambang sendiri yang tergabung dalam kelompok Solidaritas Tambang Rakyat (STR) mengatakan tidak setuju jika pertambangan akan ditutup sebab mata pencaharian mereka dari hasil tambang. Sebaliknya, jika pemerintah menawarkan solusi untuk membiayai kehidupan masyarakat PETI mereka akan legowo. Namun yang terjadi selama ini adalah, setiap kali ada pertemuan antara masyarakat PETI dan pemerintah, pemerintah tidak pernah memberikan solusi untuk masyarakat PETI jika pertambangan ditutup.

Hari ini, isu PETI di Sumbawa Barat masih hangat karena aksi penertiban pemerintah dan kebijakan akan menutup pertambangan, memunculkan aksi kelompok solidaritas tambang rakyat sebagai bentuk perlawanan mereka. Hal penting lainnya ialah antara pemerintah dengan rakyat PETI belum memiliki titik temu sehingga menjadi penting bagi peneliti untuk meneliti gerakan sosial kelompok solidaritas tambang rakyat tersebut terhadap kebijakan penutupan tambang yang dilakukan oleh pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang tersebut, menimbulkan adanya dualisme antara pemerintah dan masyarakat PETI yang belum memiliki titik temu. Pelarangan yang dilakukan pemerintah tidak memberikan solusi bagi masyarakat PETI, sementara masyarakat PETI masih tetap beraktivitas dan melakukan perlawanan-perlawanan. Dari hal ini peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian yaitu :

Bagaimana bentuk gerakan sosial dan tindakan resistensi masyarakat PETI di kecamatan Taliwang terhadap kebijakan pelarangan PETI oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk gerakan sosial dan tindakan resistensi masyarakat PETI di kecamatan Taliwang terhadap kebijakan pelarangan PETI oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu sosial khususnya mengenai gerakan sosial dan tindakan resistensi masyarakat pertambangan emas tanpa izin. Bagi peneliti sendiri untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis analisis. Sedangkan bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembandingan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul dan bahasan yang sejenis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah desa, tokoh lokal, dan masyarakat dalam mengambil keputusan, membuat hukum yang tegas dalam aktivitas pertambangan, dan memberikan solusi yang kongrit bagi masyarakat penambang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

(1). Penelitian pertama berjudul “Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi” oleh Al Zuhri pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena sifatnya adalah berbentuk kasus. Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif serta akan diuraikan secara deskriptif dalam melakukan penulisannya.

Setelah dilakukan penelitian ini, hasil penelitian diketahui bahwa bentuk konflik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Petapahan adalah aksi demo, aksi pembakaran camp, dompeng dan pelemparan mobil pemerintah, konflik horizontal dan konflik vertical dan disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor lahan, dan faktor sosial. Aktor dari konflik Peti yaitu para pemodal atau cukong yang memiliki kepentingan individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan atau hasil tambang sebanyak mungkin dan demi mencapai tujuannya. Adanya bentuk konflik, faktor penyebab konflik dan aktor konflik Sehingga memicu terjadinya konflik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Petapahan.

(2.) Penelitian kedua berjudul “Hegemoni Elit Membangun Gerakan Sosial (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sekitar Pertambangan Galian C di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri” yang dilakukan oleh Anis Suryani.

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci, yaitu tentang hubungan atau bentuk kekuasaan dari kelas superordinat terhadap subordinat atas nilai



kehidupan seperti kultur, nilai dan norma yang pada akhirnya membentuk masyarakat sebagai kelompok terdominasi mengikuti kerangka sistem dan pemikiran dari kelas superordinat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial penutupan tambang berangkat dari dampak kerusakan lingkungan fisik dan sosial serta hegemoni penguasa dari PT. Kejora dan pemerintah desa terhadap masyarakat Manyaran. Hegemoni penguasa kemudian berkembang menjadi hegemoni progresif. Dalam hegemoni progresif, elit lokal sebagai pemimpin gerakan sosial melalui tiga tahapan yaitu korporat-ekonomis, penyadaran solidaritas ekonomis dan penyadaran solidaritas atas konservasi lingkungan jangka panjang. Untuk mencapai keberhasilan gerakan sosial, dalam hegemoni progresif elit lokal menerapkan beberapa strategi yaitu *pertama* memobilisasi sumber daya manusia (*human asset*) dengan melalui penguatan jaringan sosial dan komitmen warga melalui sosialisasi dalam musyawarah bersama. Sedangkan strategi memobilisasi sumber daya *tangible* yang meliputi fasilitas dan finansial adalah dengan mendirikan portal untuk menggalang dana dan membagi hasil retribusi portal sebagai perbaikan sarana umum seperti jalan dan jembatan, serta untuk kegiatan sosial warga Manyaran.

(3). Penelitian ketiga berjudul “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi” yang dilakukan oleh Trisnia Anjami. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif karena sifatnya adalah berbentuk kasus.

Setelah melakukan penelitian ini, hasil penelitian diketahui bahwa Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik adalah pelaku penambang,

dampak sosial, dan hubungan perubahan mata pencaharian mobilitas sosial. Pelaku dari dampak sosial ini yaitu para pekerja yang memiliki kepentingan individu atau kelompok mendapatkan keuntungan atau hasil tambang yang banyak dan untuk mencapai tujuannya. Adanya pelaku, Dampak sosial, dan hubungan perubahan mata pencaharian terhadap mobilitas sehingga memicu terjadinya Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik.

## **2.2 Konsep Gerakan Sosial Sydney Tarrow**

Menurut Sydney Tarrow (1998), Gerakan Sosial adalah suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama, rasa solidaritas sosial, dan interaksi sosial yang berkelanjutan antara para elit, penentang dan pemegang wewenang. Gerakan sosial dianggap sebagai sumber harapan (*source of hope*) masyarakat dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang makin kompleks (Offe dan Melucci dalam Sujatmiko, 2002).

Tarrow (1998) menjelaskan bahwa konsep gerakan sosial harus memiliki lima komponen yang mendasar (dikutip dari Suharko, 2006 : 11). Lima komponen dasar dari gerakan sosial antara lain :

### **1. Struktur**

Gerakan sosial baru memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir, untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Hal itu diwujudkan dengan adanya upaya rotas kepemimpinan, melakukan voting untuk semua isu, memiliki organisasi *ad hoc* yang tidak permanen. Gerakan sosial baru menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non-hirarkis.

### **2. Tantangan Kolektif (*Collective Challenge*)**

Salah satu hal yang membedakan gerakan sosial dengan tindakan-tindakan kolektif lainnya, seperti bermain sepak bola, menonton pertunjukan musik, adalah adanya tantangan kolektif. Gerakan sosial selalu ditandai adanya tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang ‘mengganggu para elit’, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain atau aturan-aturan kultural tertentu. Tantangan kolektif juga ditandai dengan tindakan menghalangi, membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain yang coba mereka lawan melalui gerakan sosial.

Tantangan kolektif merupakan karakteristik yang paling umum dari gerakan sosial. tantangan kolektif seringkali disimbolkan dalam bentuk slogan, corak pakaian, perilaku pribadi, penanaman baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang baru ataupun berbeda dan lain-lain. tantangan kolektif merupakan hal yang menjadi focal point (titik fokus) bagi para aktor gerakan sosial, untuk memperoleh perhatian dari pihak yang dilawan, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

### **3. Tujuan Bersama**

Terdapat banyak alasan mengapa akhirnya individu bergabung dengan gerakan sosial. Alasan-alasan tersebut berbeda-beda tergantung dengan pertimbangan individu masing-masing. Namun, jika dilihat secara konseptual alasan paling jelas mengapa individu tergabung dalam gerakan sosial adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit.

### **4. Solidaritas dan Identitas Kolektif**

Pertimbangan kepentingan bersama dari partisipan merupakan penggerak bersama (*common de-nominator*) dari gerakan sosial yang kemudian menjembatani perubahan yang semula hanya potensi menjadi aksi nyata. Gerakan sosial akan dapat berjalan apabila terdapat perasaan-perasaan solidaritas atau identitas yang seringkali bersumber dari rasa nasionalisme,

etnisitas agama, ataupun kesamaan minat tertentu, misal minat terhadap isu sosial, lingkungan, HAM, gender dan lain-lain.

## **5. Memelihara politik perlawanan**

Dengan terus memelihara aksi kolektif melawan pihak tertentu, suatu tindakan perlawanan akan bisa menjadi gerakan sosial. komponen tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan sosial dalam upaya memelihara politik perlawanan. Aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

### **2.3 Gerakan Sosial Masyarakat**

Menurut Innal dan Idil, hlm 92-94, 2017 kerangka teoritis *social movement* yang bukan hanya *collective action* akan menjadi perspektif dalam melihat gerakan masyarakat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merupakan gerakan yang berkembang di Indonesia. Gerakan Sosial Baru menjelaskan bahwa mengapa gerakan sosial terbentuk yang jawabannya terbatas pada kondisi dalam batasan luas. Penjelasan mengenai teori gerakan sosial baru dikonsepskan dengan elaborasi teoritik antara teori mobilisasi sumber daya dan teori gerakan sosial berorientasi identitas. Teoritis Mobilisasi Sumberdaya menjelaskan aspek-aspek perjalanan dari kondisi yang ada saat ini untuk mencapai tujuan-tujuan dari gerakan tersebut. Dalam teori mobilisasi sumberdaya aspek diskontinuitas dan kontinuitas merupakan manajemen sumberdaya, dinamika organisasi, proses politik, strategi dan jejaring sosial. Sementara itu ada empat faktor mempengaruhi proses mobilisasi yaitu organisasi kepemimpinan, peluang politik dan sifat alamiah lembaga politik.

Dalam konsep organisasi dan kepemimpinan, keberadaan organisasi formal menentukan kontinuitas dari gerakan dalam mencapai tujuannya, sehingga dinamika organisasi dalam gerakan sosial menentukan bagaimana gerakan sosial bekerja mencapai

tujuan-tujuannya dengan memobilisasi sumberdayanya, baik itu sumberdaya material maupun non material. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya dana, dan jaringan. Keberadaan jaringan sosial (network social) memberikan koherensi dan hubungan horisontal dalam kelompok, dan juga merupakan fasilitator kunci untuk melakukan aksi kolektif. Telah dapat diargumentasikan bahwa semi-informal network, atau konteks mikro-mobilisasi, menyediakan hubungan antara tingkat mikro dan makro dari pembentukan kelompok-kelompok. konsep-konsep dan variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep yang dipergunakan sebagai kerangka untuk penelitian adalah faktor-faktor ideologi yang mempengaruhi kemunculan dari gerakan sosial, faktor diskontinuitas sebagai ciri dari bentuk gerakan sosial yang ekspresif, dan faktor kontinuitas yang mencirikan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan demikian, dalam menganalisis proses dan dinamika terjadinya gerakan sosial, menurut perspektif kedua teori tersebut, harus dilihat dalam 8 (delapan) aspek determinannya, yakni: Organisasi gerakan sosial; Pemimpin dan kepemimpinan; Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya; Jaringan dan partisipasi; Peluang dan kapasitas masyarakat dalam melakukan gerakan sosial; Identitas kolektif; Solidaritas; dan Komitmen.

Gerakan sosial tak hanya berbicara konsep mobilisasi sumber daya. Akan tetapi, juga mempertimbangkan aspek identitas gerakan. Kondisi tersebut dikarenakan mobilisasi sumberdaya gagal menjelaskan beberapa ekspresi kuat Gerakan sosial feminisme, environmentalism, perdamaian, perlucutan senjata, dan gerakan perekonomian lokal. Ini bukan proaktif atau offensive. Dengan tepat Cohen (dalam Singh, 2010:170) menyatakan bahwa aktor-aktor kolektif kontemporer dengan sadar berjuang melawan kekuasaan untuk secara sosial membangun identitas baru, untuk menciptakan ruang demokratis bagi aksi sosial otonom. Apa yang penting adalah: (1) menemukan serangkaian kondisi, faktor dan kekuatan pendorong yang digunakan para aktor-aktor kolektif untuk menciptakan identitas, solidaritas

dan mempertahankan itu semua; (2) memeriksa hubungan antara musuh-musuh dengan isu-isu dalam konflik; dan (3) untuk mengenali latar sosial dan budaya aksi kolektif sebagaimana kondisi dan kekuatan pendorong ini membentuk dan mencetuskan perenungan dan kesadaran para aktor dalam situasi konkret aksi kolektif dan gerakan sosial. (Innal dan Idil, hlm 92-94, 2017).

## **2.4 Konsep Resistensi**

Resistensi adalah perlawanan. Suatu perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan atau diam diam oleh seseorang untuk menentang atau melakukan protes terhadap aturan maupun tindakan orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan ketentuan yang berlaku (Susilowati, hlm 3)

Dalam perspektif sosiologi kajian tentang realitas sosial tersebut dapat dijelaskan dalam teori resistensi yang dikemukakan oleh James Scott (1993). Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang gerak. Penelitian Scott dalam hal ini memang menjadikan resistensi sebagai fokus kajiannya, sehingga sama dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Namun objek yang dikaji oleh Scott berbeda dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini. Scott mengkaji resistensi kaum tani terhadap para pihak yang oleh kaum tani tersebut dianggap merugikan para petani yang menggarap lahan pertanian, sedangkan penelitian ini mengkaji resistensi masyarakat penambang emas tanpa izin terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat PETI.

Lebih lanjut, dalam Teori Resistensi James C. Scott, Resistensi atau perlawanan menjadi daya tarik yang menarik bagi para ilmuwan sosial. Di akhir tahun 1980-an, resistensi telah menjadi trend dalam menelaah kasus-kasus yang mudah diamati serta bersifat empiris. Bagi para peneliti sosial, resistensi dianggap berciri kultural, sebab ia muncul melalui ekspresi

serta tindakan keseharian masyarakat. Analisa resistensi sendiri terhadap suatu fenomena banyak melihat hal-hal yang ada dalam keseharian masyarakat baik berupa kisah-kisah, tema pembicaraan, umpatan, serta pujian dan perilaku yang lainnya sehingga resistensi menjadi gayung bersambut dalam keilmuan sosial. Hall menegaskan bahwa resistensi bukan suatu kualitas tindakan yang tetap melainkan sebagai sesuatu yang relasional dan kontekstual. Artinya resistensi tidak dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan universal. Resistensi adalah sesuatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. Berdasarkan pendapat Hall, maka pengertian resistensi seharusnya didasarkan pada pemahaman tentang konteks dan historis masyarakatnya. James C. Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinant yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinant terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlawanan publik atau terbuka (public transcript), dan
2. Perlawanan tersembunyi atau tertutup (hidden transcript)

Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinant dengan kelas-kelas superdinant. Sementara perlawanan tersembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinant dengan kelas-kelas superdinant. Scott (2000: 385- 386) meninjau pengertian resistensi secara umum yang melihat situasi sebenarnya di masyarakat. Resistensi diartikan sebagai sesuatu yang bersifat (1) organik, sistematis dan kooperatif, (2) berprinsip tidak mementingkan diri sendiri, (3) berkonsekuensi revolusioner, dan (3) mencakup gagasan atau maksudmaksud yang meniadakan basis belakang seputar kehidupan keluarga.

James Scott mengungkapkan bahwa resistensi memfokuskan pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka. Menurut James Scott, terdapat dua bentuk resistensi, diantaranya adalah. a. Resistensi terbuka (protes sosial atau demonstrasi), adalah bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi merupakan cara-cara kekerasan seperti pemberontakan. b. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis), merupakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat. Misalnya; gossip, fitnah, atau penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa. Berdasarkan pemaparan di atas, James C. Scott berpandangan bahwa perlawanan dilakukan karena adanya penindasan yang terjadi dalam keseharian masyarakat. Perlawanan digunakan oleh masyarakat yang tertindas sebagai alat untuk membela hak yang ada pada diri mereka. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi kaum yang merasa ditindas untuk mempertahankan subsistensi yang sudah ada dengan cara menolak perubahan yang ditetapkan melalui gerakan perlawanan. Berikut adalah penjabaran konsep teori resistensi James C. Scott.

#### **2.4.1 Jenis Perlawanan James C. Scott**

Dalam Susilowati (hlm 5) Perlawanan James C. Scott terbagi atas dua jenis dilihat dari sifat dan ciri-ciri seseorang yang melakukan perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup. James C. Scott mengungkapkan bahwa perlawanan dibagi menjadi dua jenis yaitu Perlawanan terbuka (public transcript) dan Perlawanan tertutup (hidden transcript).

Berikut pemaparan jenis perlawanan James C. Scott.

1. Perlawanan terbuka (public transcript) Perlawanan terbuka (public transcript) adalah bentuk perlawanan yang dapat diamati, konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. Zuraidda (2013; 17) menjelaskan bahwa



perlawanan terbuka merupakan bentuk perlawanan yang ditandai dengan kemunculan tindakan yang bersumber dari komunikasi secara langsung antara kelas atas (kaum penguasa) dengan kelas bawah (kaum lemah). Contoh dari perlawanan terbuka adalah pemberontakan yang bersifat umum seperti demonstrasi. Scott (2000: 17) mengungkapkan bahwa ada empat karakteristik yang menunjukkan perlawanan terbuka, diantaranya sebagai berikut. (1) Perlawanan yang berwujud sesuai sistem yang berlaku, terorganisir antara satu pihak dengan pihak lain, dan saling bekerja sama. (2) Terdapat dampak perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam pergerakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. (3) Bersifat rasional dengan berfokus pada kepentingan banyak orang. (4) Bertujuan menghapuskan tindakan dominasi dan penindasan dari kaum penguasa.

Perlawanan terbuka mengarah pada pergerakan yang dilakukan secara sistematis dengan koordinasi antara pemimpin dengan anggota yang berperan serta melakukan perlawanan.

2. Perlawanan tertutup (hidden transcript) Perlawanan tertutup (hidden transcript) adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis. Perlawanan tertutup cenderung mengacu pada gerakan penolakan secara perlahan dengan memperhitungkan bentuk perlawanan, capaian yang diperoleh dan penentuan sikap individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan perlawanan. Scott (2000: 17) menjelaskan bahwa ada empat karakteristik perlawanan tertutup, diantaranya sebagai berikut. (1) Terjadi secara tidak teratur. (2) Tidak terorganisir. (3) Bersifat individual (bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berfokus pada kepentingan individu). (4) Tidak mengandung dampak perubahan. Kedua jenis perlawanan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan perlawanan sebagai alat untuk membantu kaum tertindas dalam mempertahankan kebudayaan dan sistem yang sudah ada. Perlawanan terbuka menunjukkan eksistensi perjuangan perlawanan yang diakui oleh masyarakat karena bentuk tindakannya

dapat diamati, sedangkan perlawanan tertutup cenderung tidak ada perwujudan secara nyata dalam kemunculan tindakan karena bersifat individual dan dianggap dapat berpengaruh pada tatanan yang sudah ada dalam diri seseorang.

## **2.5 Konsep Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)**

PETI merupakan singkatan dari Pertambangan Emas Tanpa Izin, yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil survei penulis lakukan, terdapat hampir 300 orang melakukan penambang dengan tradisional dan sedangkan penambang yang menggunakan mekanisme modern terdapat 30 unit dompeng yang di antaranya 1 unit dompeng ada 6 orang pekerja. Pada umumnya kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, sehingga cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan kecelakaan tambang (Zuhri, hlm 3, 2015). Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai PETI.

Mengingat kegiatan PETI yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*) dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Khusus bagi Pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan

lainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan terhadap kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang nota bene menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional. Akhirnya Indonesia kehilangan salah satu andalan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta kehilangan kesempatan untuk menurunkan angka pengangguran.

Penanggulangan masalah PETI selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan PETI identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya. Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski memberikan dampak yang berbeda, keduanya membawa resiko bagi Pemerintah. Di sisi lain, upaya untuk mewadahi masyarakat miskin (rakyat kecil) melalui pola Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Skala Kecil belum memberikan hasil optimal. Disamping dihadapkan masalah internal, kurangberhasilan kedua pola ini juga diakibatkan oleh keberadaan cukong di tengah--tengah masyarakat miskin yang terus meracuni kehidupan mereka.

### **2.5.1 Dampak Positif PETI**

Kegiatan pertambangan ini relatif dapat mengatasi ekonomi keluarga. Dengan melakukan penambangan emas sebagian masyarakat Kuansing dapat meningkatkan ekonomi keluarganya, namun kalau kita perhatikan tidak semua penambang emas yang jaya kehidupan keluarganya. Sepertinya walaupun dapat uang banyak kalau cara hidupnya tidak pandai tetap saja kehidupan keluarganya tidak terlalu berubah (walaupun sebahagian ada yang menjadi kaya mendadak).

### **2.5.2 Dampak Negatif PETI**

Dengan status yang tanpa izin, maka otomatis PETI tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif, Dengan kegiatan PETI yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi, para pelaku PETI praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Di hampir semua lokasi kegiatan PETI, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi, baik antara perusahaan resmi dengan pelaku PETI, antara masyarakat setempat dengan pelaku PETI (pendatang), maupun diantara sesama pelaku PETI sendiri dalam upaya mempertahankan/me-lindungi kepentingan masing-masing. Masyarakat bawah, yang seringkali menjadi korban dari penyanggah dana (penadah) dan oknum aparat, mengakibatkan kehidupan mereka sangat rawan terhadap munculnya gejolak sosial. (Trisnia, 2017).

## **2.6 Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia**

Pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/sampingan di daerah-daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian intan, emas dan timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya :

- Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.

- Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- Kemudahan pemasaran produk bahan galian.
- Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum/peraturan pertambangan.
- Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

## **2.7 Upaya Pengendalian PETI Yang Telah Dilakukan Pemerintah**

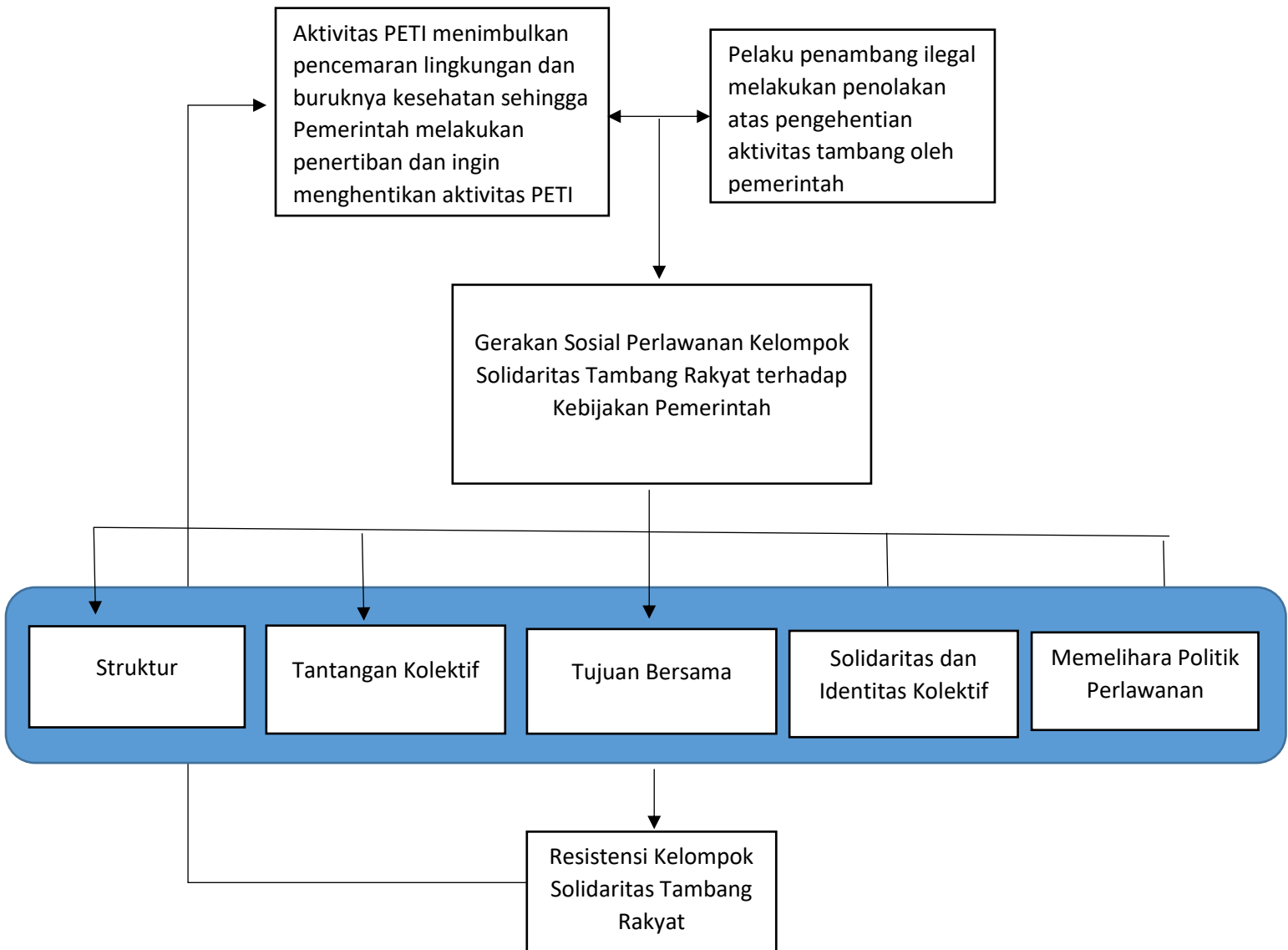
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan yang tidak terkendali dari pertambangan tanpa izin (PETI), pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11/tahun 1967 yang berkaitan dengan upaya penghentian semua usaha pertambangan tersebut, dengan pengecualian dapat melanjutkan usahanya apabila berstatus Pertambangan Rakyat untuk bahan galian intan dan Tambang Tradisional untuk bahan galian emas. Perkembangan PETI mencapai tingkat yang mengkhawatirkan ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1997, ditunjukkan oleh beragamnya bahan galian yang diusahakan terutama dari jenis-jenis yang relatif mudah dipasarkan dan karena alasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 1998 terjadi pergantian pemerintahan yang membawa Indonesia ke nuansa demokratisasi. Hal ini berpengaruh kepada upaya penanggulangan PETI melalui penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan skala kecil yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Kemudian Pemerintah berupaya untuk merealisasikannya dengan membuat peraturan tentang pertambangan resmi berskala kecil melalui penetapan Keputusan Bersama

Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah; Nomor 2002.K/20/MPE/1998 – Nomor 151A Tahun 1998 – Nomor 23/SKB/M/XII/1998. Sejak tahun 1999 hingga saat ini Negara Republik Indonesia sedang menjalankan sistem desentralisasi melalui pembagian pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat dan daerah/otonom. Upaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam penanggulangan masalah PETI terus dilanjutkan melalui studi segala hal yang berkaitan dengan pertambangan skala kecil, bekerjasama dengan pemerintahan otonom dari tingkat provinsi dan kabupaten di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2000 Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1091K/70/MPE/2000 membentuk Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Pelaksanaan kegiatan ditekankan kepada penanggulangan secara fungsional oleh seluruh instansi yang ditentukan dalam Inpres diatas, dengan Tim Terpadu berfungsi sebagai forum koordinasi dalam upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang bersifat lintas sektoral; dimana tindak lanjutnya tetap dilakukan secara fungsional dan sesuai kewenangannya oleh institusi-institusi terkait sesuai kewenangannya. Informasi diatas menunjukkan sejauh mana Pemerintah Pusat telah berupaya menetapkan aturan-aturan hukum tentang usaha pertambangan untuk menanggulangi PETI, namun kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

## 2.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pihak penertib membuat aturan untuk menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah dengan pihak penambang yaitu kelompok penambang yang tergabung dalam kelompok Solidaritas Tambang Rakyat (STR). Dengan kekuatan legitimasinya, pemerintah kabupaten sumbawa barat melakukan penertiban kepada pihak penambang ilegal. Pemerintah melihat aktivitas para penambang tanpa izin adalah bentuk ketidaktaatan sosial karena menimbulkan kerusakan lingkungan dan buruknya

kesehatan bagi para pelaku pertambangan. Namun dari pihak penambang ilegal melakukan aksi protes di depan kantor pemerintahan kabupaten sumbawa barat karena mereka menganggap penertiban yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan opsi lain bagi mereka sebagai ganti untuk mereka dalam mencari nafkah. Hal ini pun akhirnya menimbulkan konflik antara pemerintah dan para penambang ilegal.

Adanya konflik ini kemudian membuat para penambang ilegal membentuk diri dalam kelompok sosial yang dinamakan kelompok solidaritas tambang rakyat. Dengan berdasarkan kekuatan adanya struktur, tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif serta memelihara perlawanan politik sebagaimana sesuai dengan konsep Sydney Tarrow maka kelompok solidaritas tambang rakyat membentuk resistensi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### **3.1.1 Kualitatif Deskriptif**

Penelitian deskriptif dilakukan agar peneliti memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan fenomena sosial dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa dan tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini ada.

Oleh karena penelitian ini berusaha menguraikan fenomena sosial dari perilaku individu atau kelompok masyarakat, maka penelitian ini cenderung menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena umum dalam kelompok masyarakat yang menjadi alasan mengapa sebuah fenomena gerakan sosial masyarakat pertambangan emas tanpa izin (PETI) dalam melawan pemerintah. Tentunya, dengan penelitian kualitatif, peneliti akan mendapatkan pemahaman atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian melalui sudut pandang partisipan yang digali. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Creswell dalam Raco : 2010 : 7). Agar peneliti dapat memperoleh pemahaman akan suatu gejala yang diteliti, maka peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan partisipan penelitian. Sudut pandang partisipan itulah yang nantinya akan dianalisis, diinterpretasi, dan dideskripsikan oleh peneliti sesuai prosedural penelitian kualitatif deskriptif.

### 3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dari Miles dan Huberman. Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, *Membangun sajian*, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles dan Huberman, 2007: 173-174).

Kedua, *Memasukkan data*. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk 46 digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter (Miles dan Huberman, 2007: 174).

Ketiga, *Menganalisis data*. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya (Miles dan Huberman, 2007: 177). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai

dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemilihan wilayah kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa hal, yaitu, *pertama*, wilayah Taliwang merupakan wilayah dengan tingkat jumlah pertambangan emas yang tinggi. *Kedua*, buruknya tingkat kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas gelondong PETI berpengaruh pada kesehatan masyarakat pelaku PETI dan buruknya kesehatan lingkungan. *Ketiga*, rencana penelitian skripsi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ini didasarkan atas peristiwa aksi demonstrasi atau gerakan sosial masyarakat penambang emas tanpa izin kepada pemerintah yang menertibkan para pelaku PETI. Berdasarkan peristiwa ini, peneliti kemudian mengangkat permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin khususnya di wilayah kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kajian telitiannya.

Untuk waktu penelitian, penelitian ini akan terlaksana selama satu bulan lebih pada tahun 2020. Pertimbangan waktu ini tentunya didasarkan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi beserta analisa lapangan. Secara kongrit, pemilihan waktu berdasarkan atas pertimbangan waktu observasi, pencarian data di Desa, adaptasi peneliti di Desa, wawancara bersama narasumber dan analisis data lapangan.

### **3.3 Batasan Penelitian**

Fokus penelitian ini tertuju pada Gerakan Sosial Masyarakat PETI dalam melawan pemerintah dan tindakan resistensi kelompok Solidaritas Tambang Rakyat. Masyarakat PETI yang dalam hal ini adalah semua masyarakat yang tergabung dalam kelompok solidaritas tambang rakyat yang dimana mereka sedang memperjuangkan hak-haknya. Pada sisi lain, sumbawa barat ini merupakan wilayah dengan jumlah pertambangan emas yang tinggi. Pemerintah dalam hal ini

memiliki legitimasi dalam menyampaikan sosialisasinya, dan melakukan penertiban kepada masyarakat PETI. Untuk itu, peneliti membatasi penelitian ini pada Gerakan Sosial Masyarakat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

### **3.4 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Moleong (1989) merupakan orang dalam latar penelitian. Artinya subjek disini ialah narasumber-narasumber yang nantinya akan menjadi partisipan dalam memberikan informasi, baik informasi utama maupun informasi pendukung. Sementara objek penelitian dalam hal ini merupakan titik utama dari rumusan masalah penelitian yang akan dikaji. Adapun subjek yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu, warga pertambangan emas tanpa izin yang tergabung dalam kelompok solidaritas tambang rakyat. Kemudian yang menjadi objek penelitian ini adalah bentuk gerakan sosial dan tindakan resistensi dari kelompok solidaritas tambang rakyat.

### **3.5 Penentuan Pemilihan Informan**

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Cara penggunaan teknik purposive sampling adalah memilih informan secara sengaja yang dimana informan tersebut tentunya memiliki kaitan dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui informasi-informasi umum mengenai lokasi penelitian dan mengetahui kondisi umum dari permasalahan penelitian. Dari informan kunci inilah peneliti mendapat petunjuk untuk mengetahui siapa saja yang bisa dijadikan informan utama. Informan kunci yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala desa dan tokoh formal penting desa lainnya. Kemudian untuk informan utama adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok “Solidaritas Tambang Rakyat”.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.6.1 Observasi**

Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung (Ngalim Purwanto, 1985). Artinya, dengan melakukan pengamatan lapangan, peneliti dapat memperoleh gambaran lebih luas tentang permasalahan yang akan diteliti.

Pada tahap ini peneliti mulai terjun ke lokasi penelitian untuk melihat hal-hal umum yang sekiranya memiliki kaitan dengan masalah penelitian, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi titik fokus, melakukan pembatasan objek pengamatan, dan mencatat hal-hal penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan penelitian. Sedangkan untuk jenis observasi, peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan. Peneliti dalam observasi ini berperan untuk melakukan pengamatan tanpa harus terlibat dan mengambil peran dalam aktivitas subjek yang diteliti. Dengan begitu peneliti tidak akan kesulitan dalam melakukan pencatatan dari hasil pengamatan.

Adapun langkah-langkah peneliti dalam melakukan observasi menurut Creswell (2008) yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Memilih lokasi observasi yang tepat. Artinya, peneliti menentukan lokasi yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menangkap realitas masalah yang diangkat. Kemudian pemilihan lokasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang jelas. Misalnya, peneliti mulai memilih lokasi letak kantor desa sebagai tujuan pertama agar memperoleh informasi umum seputar keadaan sanitasi desa dan peran tokoh agama desa. Dari pemilihan lokasi pertama ini, peneliti akan mendapat petunjuk lokasi dan informasi selanjutnya yang harus dituju. Pada tahap ini pula, akan melakukan proses perizinan secara formal di tempat formal seperti kantor desa.

2. Melakukan observasi sederhana. Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengenalan, beradaptasi dan membina hubungan dengan warga sekitar ataupun narasumber yang dituju. Selain

itu, peneliti mulai menggali data umum seputar keadaan sanitasi masyarakat sekitar, seperti faktor penyebab buruknya perilaku sehat sanitasi masyarakat, apa saja pengaruh tokoh agama dalam masyarakat sekitar.

3. Menentukan subjek yang akan di observasi dan waktu observasi. Setelah membangun hubungan dengan orang-orang sekitar desa, peneliti dapat menentukan subjek-subjek selanjutnya yang akan diobservasi. Pada tahap ini juga, peneliti sudah bisa menentukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama observasi berlangsung. Selain itu, peneliti juga mencoba membuat *plan* seperti kapan dan berapa lama waktu observasi akan dilakukan. Kemudian membuat jadwal atas apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti di tiap harinya. Dengan melakukan persiapan, peneliti akan matang jika sudah berada di lapangan.

4. Menentukan peran observer. Dalam hal ini, setelah peneliti sudah paham dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama observasi, maka peneliti dapat menentukan peran dan sikapnya ketika menjadi observer.

5. Melakukan observasi berkali-kali. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui informasi secara komprehensif dan valid.

6. Membuat *Fieldnotes*. Catatan lapangan tentu berfungsi untuk mencatat setiap perilaku dan temuan informasi yang diobservasi. Setelah itu peneliti melakukan analisis terhadap temuan satu dan temuan lainnya. Selain *fieldnotes*, peneliti juga menggunakan rekaman saat melakukan wawancara kecil selama observasi. Dari setiap catatan dan rekaman, maka peneliti dapat menarik benang merah antara perilaku atau temuan satu dan lainnya.

7. Membuat peta gambaran terkait hal-hal yang akan diobservasi, kemudian peneliti menggabungkan antara perilaku, lingkungan dan informasi lainnya agar peneliti mendapat gambaran secara lebih komprehensif terhadap elemen-elemen yang diobservasi.

8. Melakukan pencatatan *descriptive fieldnotes* dan *reflective fieldnotes*. Artinya peneliti mendeskripsikan hasil-hasil dari catatan dan rekaman serta mulai menangkap refleksi dari setiap catatan.

9. Sebagai observer nonpartisipan, peneliti melakukan perkenala dengan subjek yang akan diobservasi namun dalam hal ini, peneliti tidak akan terlihat aktif dan interaktif agar kehadiran peneliti dapat diterima dengan hangat oleh subjek yang diteliti.

10. Etika. Setelah usai melakukan observasi, tentu peneliti harus memperhatikan etika. Peneliti tidak serta merta meninggalkan tempat penelitian, akan tetapi izin pamit terlebih dahulu dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah bersedia membantu selama observasi berlangsung.

### **3.6.2 Wawancara**

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Di dalam interaksi tersebut terdapat proses tanya jawab, dimana kedua pihak (atau lebih) yang terlibat memiliki hak yang sama untuk bertanya dan memberikan jawaban. Metode wawancara digunakan oleh peneliti agar memperoleh informasi yang akurat. Dalam menggunakan teknik wawancara, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu, sasaran, maksud, dan masalah apa yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur ialah kondisi dimana peneliti terpaku dengan pedoman dan pertanyaan yang sudah dipersiapkan (*guide interview*), sehingga fungsi peneliti hanya bertanya dan fungsi subjek hanya menjawab. Namun pada kondisi tertentu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan bentuk semi terstruktur, dimana peneliti dapat bertanya sebarang-bebasnya secara kondisional namun tetap mengarah pada fokus permasalahan, dan subjek pun berhak bertanya kepada peneliti. Dengan wawancara semi terstruktur ini, tidak ada jarak yang tegas antara peneliti dengan subjek. Selain itu, peneliti juga dapat mengatur ulang setting wawancara.

### **3.6.3 Kajian Dokumen**

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan ataupun pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya. Dokumen tersebut bisa berbentuk catatan harian, dokumen data formal, kajian literatur dan data berupa gambar, foto, video dan sebagainya.

## **3.7 Jenis dan Sumber Data**

Jenis sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

### **3.7.1 Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari tempat maupun objek penelitian itu dilakukan, menurut Arikunto (2010:22). Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata – kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari informan secara langsung. Cara mendapatkan data primer yaitu dapat dengan melakukan observasi, maupun dengan wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

### **3.7.2 Data Sekunder**

Menurut Arikunto (2010:22) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer, Data penelitian dapat didapatkan dari hasil observasi peneliti maupun dari studi pustaka, data sekunder dapat berbentuk dokumen grafis



seperti tabel, catatan SMS foto dan lain- lain. Data sekunder ini didapatkan melalui proses pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dengan informan.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan

cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 39 yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi

pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: 40 Bagan 2 :

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjami, Trisnia. Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial DAN Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 4 No. 2017. Riau
- Danny Z Herman. Pertambangan Tanpa Izin dan kemungkinan alih status menjadi pertambangan skala kecil. Hlm 3-4.
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif” Majalah Ilmiah Pawiyatan. Vol : Xx, No : 1, Maret 2013
- Fakih, Mansour. “Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia”. Pustaka Pelajar. 2008. Yogyakarta
- Fitri, Annisa Innal & Akbar, Idil. Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov, Vol.3 No.1., 2017
- Kusmarni, Yani. “Studi Kasus. (John W. Creswell)”. Diunduh Dari File.Upi.Edu/Direktori/FPIPS/JUR...YANI\_KUSMARNI/Laporan\_Studi\_Kasus.Pdf
- Susan, Novri. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer”. Kencana Prenada Media Group. 2009. Jakarta
- Susilowati, Enik Zuni. Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi James Scott). JBSI FBS Universitas Negeri Surabaya
- Zuhri Al. Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Jom FISIP Vol.2 No.2, 2015